



Delapan Prioritas Pembangunan Singkawang 2021

SINGKAWANG, SP

Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang menetapkan delapan prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2021. Kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi Kalbar dan APBN.

"Hal ini untuk mencapai sinergi antara pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi," kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan di Kantor Camat Singkawang Tengah, Senin (10/2).

Delapan prioritas program tersebut, kata Tjhai Chui Mie, yaitu pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.

Kemudian, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kinerja aparatur birokrasi serta pengembangan dan penataan kawasan. "Selain itu, prioritas lainnya yaitu pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang dan harmonisasi umat beragama dan kebudayaan,"

ujarnya.

Dia mengatakan, dengan delapan prioritas program tersebut memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara aspek pembiayaan atau anggaran yang dikelola oleh Pemkot Singkawang relatif masih kecil.

Untuk menyikapinya, Pemkot Singkawang mengupayakan sebagian target atau prioritas pembangunan tahun 2021 tersebut dibiayai oleh APBD Provinsi Kalbar dan APBN. "Kita upayakan sebagian prioritas dibiayai APBD Provinsi dan APBN," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Singkawang, Muhammadin berharap Wali Kota lebih memfokuskan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat dengan delapan program tersebut. "Karena dalam delapan program itu bisa lebih memfokuskan mana yang terlebih dahulu diutamakan, terlebih untuk mencapai itu tentunya tidak dengan biaya yang sedikit," katanya.

Jadi harapannya, Wali Kota Singkawang bisa fokus ke beberapa program yang harus diutamakan. "Dari pada fokus semua, namun

sasaran akan sangat lambat selesai, lebih baik memfokuskan mana yang utama untuk mencapai tujuan, dan OPD harus bekerja ekstra untuk mendapatkan sumber pendanaan baik itu provinsi ataupun pemerintah pusat," ujarnya.

Sebagai mitra kerja OPD, harus berperan aktif untuk berkordinasi kepada DPRD sesuai tupoksi Anggota DPRD dari Komisi 1, 2 dan 3. Agar, DPRD sebagai utusan masyarakat bisa juga menyampaikan informasi-informasi terkait tujuan pembangunan yang akan berlangsung atau yang sudah terlaksana.

"Sehingga hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik, karena DPRD adalah salah satu unsur penyelenggara yang memiliki hak untuk menyetujui dan menolak penganggaran APBD sesuai aturan," ungkapnya.

Salah satu harapan dia sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Singkawang, dalam lima tahun kedepan Wali Kota menjabat ada perubahan yang sangat signifikan, apalagi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kota Singkawang.

"Tentu itu hasil kerja keras pemerintah daerah, demikian juga sebaliknya, apabila Singkawang tingkat ekonominya menurun, maka itu adalah kegagalan dalam memimpin baik Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta DPRD sebagai mitra dan unsur penyelenggara," jelasnya. (rud/yun)